



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB) Kabupaten Seruyan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penyusunannya merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Kinerja yang dicapai atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan penggunaan anggaran serta pelaksanaan rencana kerja tahunan yang telah dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan tahun 2026 dapat dimanfaatkan untuk tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan.

Kami berharap Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kepala,


ARNIANSYAH, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Dasar Hukum	6
BAB II PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Kinerja	7
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	7
2.3 Program dan Kegiatan	7
BAB III PERJANJIAN KINERJA	13
BAB IV PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan menghambat percepatan pembangunan dan penanggulangan masalah sosial di masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kriminalitas, rendahnya daya beli dan derajat kesehatan yang rendah akan terus membebani proses pembangunan karena hasil pembangunan tidak akan mencukupi semua kebutuhan penduduk dan menimbulkan beberapa masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Maka untuk mengatasi hal tersebut program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut.

Penduduk, khususnya perempuan dan anak dapat menjadi aset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun di pihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan faktor yang dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.

Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran dan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Seruyan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi di atas maka keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Seruyan akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat yang selama ini dianggap termarginalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan. Penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

1.2. Struktur Organisasi

Penyusunan Perjanjian Kerja tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan sebagai implementasi dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabilitas kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan rencana pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perjanjian Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PK KJIP) ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang meliputi tugas pokok dan fungsi serta kondisi kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
2. Gambaran proses pembangunan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang berisikan tujuan dan sasaran, kebijakan, strategi, program serta kegiatan dan evaluasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta Rencana Kerja (RENJA) dalam mewujudkan visi, misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
3. Menjadi bahan masukan bagi kepentingan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Tujuan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) secara demografi adalah untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara fisiologis adalah untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB). Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang apabila dicapai $NRR = 1$ dengan *Total Verility Rate* 2,10.

Selanjutnya perkembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Khusus tentang pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah.

Selama tahun 2025 telah terjadi 5 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Seruyan, ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu mendapat perhatian serius karena akan berdampak terhadap tatanan sosial, psikologis dan tumbuh kembang anak. Berdasarkan kondisi di atas maka pemahaman masyarakat, melalui pendidikan terhadap masyarakat perlu terus dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Untuk mencapai kondisi di atas selama tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan terus meningkatkan pelayanan dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

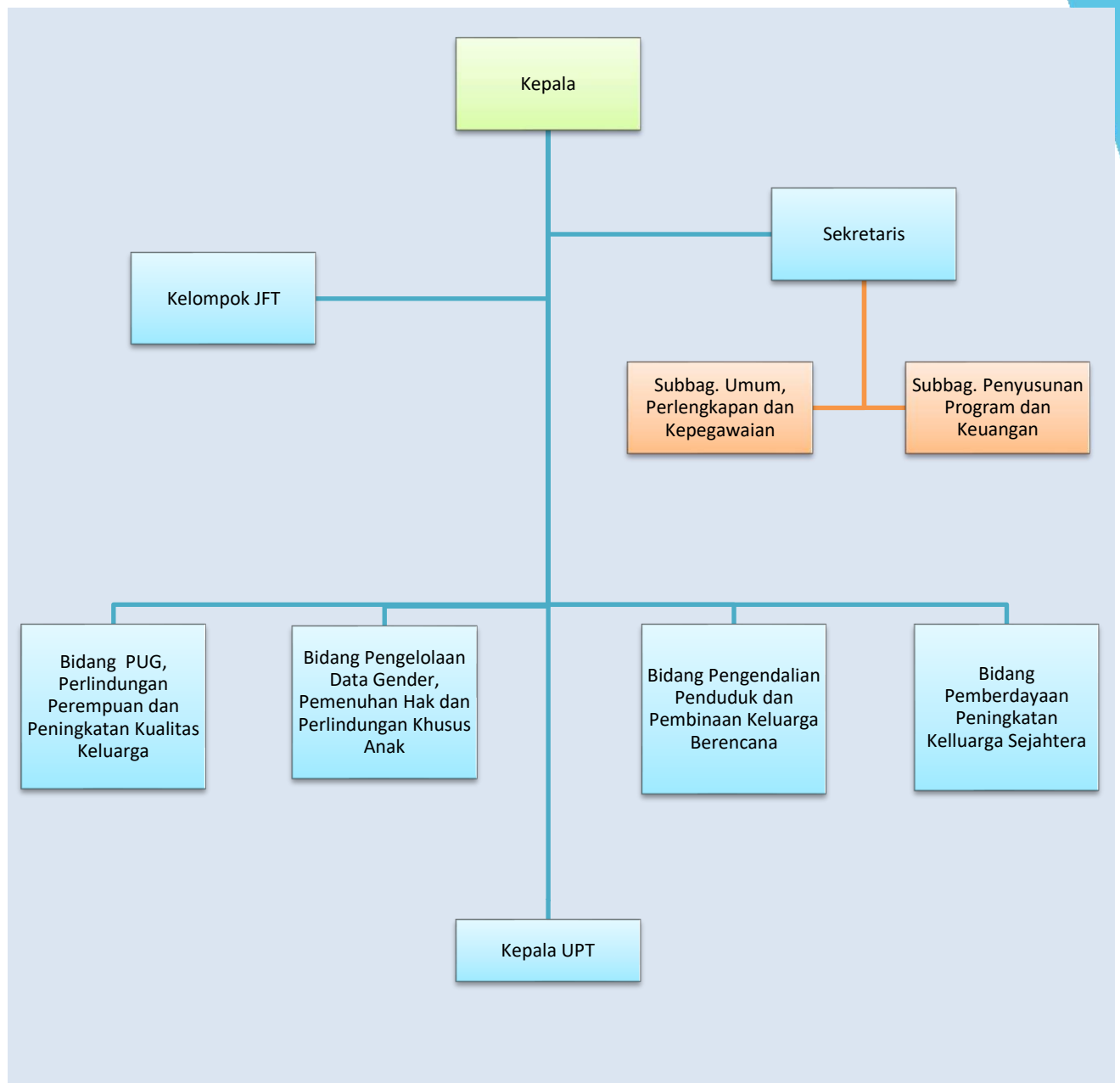
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- b. pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan;

- c. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah;
- e. penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi;
- f. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah;
- g. peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah;
- h. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
- i. penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah;
- j. pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah;
- k. pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha;
- l. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- m. pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah;
- n. penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerluk Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah; dan
- o. penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut di atas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dibantu oleh pejabat-pejabat dan para pelaksana yang tersebar di Sekretariat, Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Hak Dan Tumbuh Kembang, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat. Selain itu terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tersebar di 10 kecamatan dan petugas lapangan KB.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan, terdiri dari :



1.3. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam RPJMD 2025 - 2029, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

2.1 Tujuan

Tujuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan yang mengacu pada rencana Strategis Dinas P3AP2KB Tahun 2025 - 2029 adalah ***“Terwujudnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berkualitas”***

2.2 Sasaran

Sasaran disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Seruyan. Tentunya sasaran ini memberikan fokus pada penyusunan program/kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Meningkatkan Ketahanan Keluarga Berkualitas.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 antara lain :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	1. Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.
					3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
				Perlindungan Perempuan	1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.	1. Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	1. Sub Kegiatan Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
				Pemenuhan Hak Anak	1. Kelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. 2. Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Perlindungan Khusus Anak	1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota.
2	Meningkatkan Ketahanan Keluarga Berkualitas.			Pengendalian Penduduk	1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
					2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
				Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 2. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
					2. Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)	1. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Kegiatan Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
					4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peras Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
				Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	1. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 2. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 3. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	1. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita). 2. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	58,00	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
					2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1. Pembinaa, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
					4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Barang Cetak dan Penggandaan. 6. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Atau Lapangan. 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja mulai jenjang Esselon II sampai dengan pejabat struktural yang ada dibawahnya. Penyusunan dan penetapan ini bertujuan agar adanya komitmen antara atasan dengan bawahan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas kerja. Dan Perjanjian Kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pegawai.

Adapun penetapan isi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARNIANSYAH, S.Pd., MM
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.
Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Kepala Dinas P3AP2KB

ARNIANSYAH, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1970614 199702 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47
2	Meningkatkan Ketahanan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	58,00

Program	Anggaran	Keterangan
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 805.917.000	APBD
Perlindungan Perempuan	Rp. 30.029.000	APBD
Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 44.083.000	APBD
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 15.664.000	APBD
Perlindungan Khusus Anak	Rp. 40.581.000	APBD
Pemenuhan Hak Anak	Rp. 392.547.000	APBD
Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 762.307.000	APBD
Pengendalian Penduduk	Rp. 117.220.000	APBD
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 1.487.347.626	APBD
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.705.619.230	APBD

Pihak Kedua**Bupati Seruyan****AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.****Pihak Pertama****Kepala Dinas P3AP2KB**
ARNIANSYAH, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1970614 199702 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAIRIL ANWAR, SE., MM.**

Jabatan : Sekretaris Dinas P3AP2KB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARNIANSYAH, S.Pd., MM**

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas


ARNIANSYAH, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Sekretaris


HAIRIL ANWAR, SE., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701001 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	Presentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	100%
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3.	Tersedianya Administrasi Kepegawaian	Presentase Administrasi Kepegawaian.	100%
4.	Tersedianya Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Presentase Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.705.619.230,-	APBD
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	20.580.000,-	APBD
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	5.646.592.878,-	APBD
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp.	96.346.000,-	APBD
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Rp.	301.937.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp.	1.492.538.352,-	APBD
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp.	147.625.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas

ARNIAN SYAH, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Sekretaris

HAIRIL ANWAR, SE.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701001 200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEBY SRI WULANDANI, SH.,MAP.**

Jabatan : Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAIRIL ANWAR, SE.,MM.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

HAIRIL ANWAR, SE.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701001 200501 1 006

Pihak Pertama
Kasubbag. Penyusunan Program dan
Keuangan

DEBY SRI WULANDANI, SH.,MAP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19741216 200604 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen
2.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen
3.	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen laporan keuangan	12 dokumen

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.667.172.878,-	APBD
➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	20.580.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	6.000.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	14.580.000,-	APBD
➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.646.592.878,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.479.389.878,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	Rp	155.640.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD.	Rp	11.563.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Sekretaris

HAIRIL ANWAR, SE.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701001 200501 1 006

Pihak Pertama

Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan

DEBY SRI WULANDANI, SH.,MAP.
Pembina (IV/a)
NIP. 19741216 200604 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIO STEPANUS TUNDAN, S. H.**

Jabatan : Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAIRIL ANWAR, SE.,MM.**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

HAIRIL ANWAR, SE.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701001 200501 1 006

Pihak Pertama
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

RIO STEPANUS TUNDAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19851219 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum dan Perlengkapan.	Jumlah dokumen administrasi umum dan perlengkapan yang disusun	12 dokumen
2.	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawaian yang dilayani administrasinya	12 dokumen

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.038.446.352,-	APBD
➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	96.346.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Rp	53.250.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Rp	43.096.000,-	APBD
➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	301.937.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Rp	5.709.800,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Rp	40.635.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Rp	15.081.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	26.095.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	12.664.200,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	201.752.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.492.538.352,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	8.800.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	115.807.200,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	1.367.931.152,-	APBD
➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	147.625.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Rp	44.280.000,-	APBD

Pajak Kendaraan Perorangan Sub Kegiatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	46.050.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	7.070.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	50.225.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Pertama

Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian



RIO STEPANUS TUNDAN, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19851219 201001 1 005

Pihak Kedua

Sekretaris



HAIRIL ANWAR, SE.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19701001 200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AJIANSYAH, S.Pd., MM.**
Jabatan : Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARNIANSYAH, S.Pd., MM.**
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Pertama

Kepala Bidang PUG, Perlindungan
Perempuan
dan Peningkatan Kualitas Keluarga

AJIANSYAH, S.Pd., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790808 200604 1 016

Pihak Kedua

Kepala Dinas

ARNIANSYAH, S.Pd., MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700614 199702 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan PUG	40 lembaga
2.	Meningkatkan peran aktif Organisasi Perempuan dalam pembangunan	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	4 organisasi
3.	Tersedianya Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya	Jumlah layanan keluarga mewujudkan kesetaraan gender	50 layanan

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.	Rp.	805.917.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	105.917.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp.	700.000.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	44.083.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.	44.083.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas


ARNIANSYAH, S.Pd., MM.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga


AJIANSYAH, S.Pd., MM.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19790808 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PIRUS YUANI, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender, Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Khusus Anak.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.**
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Dinas


ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak,
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak.


PIRUS YUANI, S.Sos.,M.A.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780611 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Jumlah kegiatan pengumpulan data gender	1 kegiatan
2.	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan	2 kecamatan
3.	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Lembaga/ Forum Anak Daerah yang dibentuk di tingkat kecamatan.	3 lembaga

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.	Rp.	15.664.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.	15.664.000,-	APBD
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	392.547.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp.	57.016.750,-	APBD
➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp.	335.530.250,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026**Pihak Kedua**

Kepala Dinas

ARNIANSYAH, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

PIRUS YUANI, S.Sos. M.A.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780611 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **APRIANTONI, S.Hut.,MM.**

Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.**

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas

ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala UPT Perlindungan Perempuan
Dan Anak.

APRIANTONI, S.Hut.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19740402 200903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

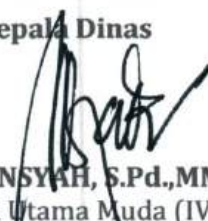
No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan layanan rujukan lanjutan bagi korban	Jumlah penerima manfaat	5 orang
2.	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga	3 Lembaga

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	30.029.000,-	APBD
	➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp.	30.029.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	40.581.000,-	APBD
	➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	40.581.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas


ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala UPT Perlindungan Perempuan
Dan Anak.


APRIANTONI/S.Hut.,MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19740402 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.**
Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas

ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan yang disusun	1 dokumen
2.	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab	Cakupan Pelaporan Data per kecamatan	100%
3.	Meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase keluarga yang terpapar Bangga Kencana	32%
4.	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Lini Lapangan yang diberdayakan	100%
5.	Meningkatkan Pelaksanaan Pelayanan KB Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Fasyankes	24 Fasyankes
6.	Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	Jumlah Pengurus Pokja Kampung KB	100 kelompok

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	117.220.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.	R p.	57.220.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp.	60.000.000,-	APBD
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	762.307.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.	Rp.	300.120.000,-	APBD

➤ Kegiatan Pendayagunaan Penyuluah KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)	Rp.	75.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp.	252.187.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peras Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB .	Rp.	135.000.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas

ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM

Penata Tingkat I (III/d).
NIP. 19780425 200501 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ISTIYANAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.**

Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Pebruari 2026

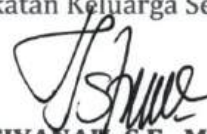
Pihak Kedua

Kepala Dinas


ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Sejahtera


ISTIYANAH, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750327 200604 2 017



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN
KELUARGA BERENCANA DAN KEPERAWATAN

Perjanjian Kinerja ini dibuat oleh Kepala Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keperawatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten...

Menyebutkan: Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten...
Nama: ARNANUSYAH S.Pd., MM.
Jabatan: Kepala Dinas Kesehatan
Menyebutkan: Pihak Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keperawatan
Nama: ESTIVANUS S.Pd.
Jabatan: Kepala Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keperawatan

Perjanjian Kinerja ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Perjanjian Kinerja ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten...

Menyebutkan: Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten...
Nama: ARNANUSYAH S.Pd., MM.
Jabatan: Kepala Dinas Kesehatan
Menyebutkan: Pihak Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keperawatan
Nama: ESTIVANUS S.Pd.
Jabatan: Kepala Dinas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Keperawatan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

No	Sasaran Kinerja/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan.	45%
2.	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pembangunan keluarga	3 organisasi

Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.487.347.626,-	APBD
➤ Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Rp. 405.596.626,-	APBD
➤ Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Rp. 1.081.751.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas

ARNIANSYAH, S.Pd.,MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007

Pihak Pertama

**Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera**

ISTIYANAH, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750327 200604 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SRI PAMIATI, SKep.,Ns.**

Jabatan : Penyuluh Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIO STEPANUS TUNDAN, SH.**

Jabatan : Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

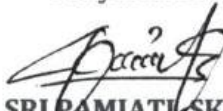
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian


RIO STEPANUS TUNDAN, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19
201001 1 00

Pihak Pertama
Penyuluh Sosial


SRI PAMIATI, SKep.,Ns.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850318 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

	Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Laporan/ Dokumen yang tersusun	12 dokumen
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 dokumen

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ➤ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. ➤ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	43,096,000,'	APBD
	Rp.	201.752.000,'	

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

RIO STEPANUS TUNDAN, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19 201001 1 00

Pihak Pertama
Penyuluh Sosial

SRI PAMIATI, SH.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850318 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KHRISTIN FEBRIANDARI LALANA, S.A.P.**

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Pertama

Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana Ahli Muda.

KHRISTIN FEBRIANDARI LALANA,
S.A.P.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810208 200604 2 019

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

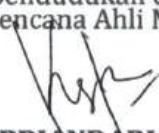
No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Laporan
2.	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	60.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.			
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp.	60.000.000,-	APBD
➤ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	150.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.			
- Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana.	Rp.	150.000.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak KeduaKepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.


RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

Pihak PertamaPenata Kependudukan dan Keluarga
Berencana Ahli Muda.


KHRISTIN FEBRIANDARI LALANA, S.A.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19810208 200604 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AINUL ABDALAH, S.H.I.**

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

Pihak Pertama

Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana Ahli Muda.

AINUL ABDALAH, S.H.I.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830120 201001 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	18 kampung KB

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	57.220.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.			
- Sub Kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota .	Rp.	57.220.000,-	APBD
➤ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	135.000.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB .			
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Rp.	135.000.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

Pihak Pertama

Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana Ahli Muda.

AINUL ABDALAH, S.H.I.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830120 201001 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAID ALMAH, S.Pd.**
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

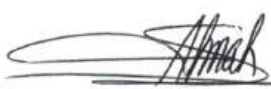
Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

Pihak Pertama

Penelaah Teknis Kebijakan.


SAID ALMAH, S.Pd.
Penata Muda (III/a).
NIP. 19780204 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sub Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	114 orang

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	252.187.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
- Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Rp.	252.187.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak KeduaKepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.**RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.**Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007**Pihak Pertama**

Penelaah Teknis Kebijakan.


SAID ALMAH, S.Pd.
Penata Muda (III/a).
NIP. 19780204 200604 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IDA FRIDA.**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pembinaan KB

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

Pihak Pertama

Pengadministrasi Perkantoran.

IDA FRIDA.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830930 200701 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10 dokumen
2.	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100 orang

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	225.120.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.			
- Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Rp.	150.120.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB)			
- Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp.	75.000.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Pembinaan Keluarga Berencana.

RIDHO FAHNURYADI, SKM., MM.

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19780425 200501 1 007

Pihak Pertama

Pengadministrasi Perkantoran.

IDA FRIDA.

Penata Muda (III/a)
NIP. 19830930 200701 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SITI IFFAH, M.PD.SI**

Jabatan : JF Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Sistem
Pengelolaan Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak
dan Perlindungan Khusus Anak.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **PIRUS YUANI, S.Sos**

Jabatan : Kepala Bidang PDG, PHA dan PKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang PDG, PHA dan PKA

PIRUS YUANI, S.Sos., M.A.P.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19780611 200604 2 016

Pihak Pertama

Penyuluh Sosial Ahli Muda

SITI IFFAH, M.PD.SI.

Penata Muda Tingkat I (III/b)

NIP. 19840405 200903 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN**

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektoral dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah stakeholder yang di Advokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	6 lembaga
2.	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga
3.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	3 lembaga

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	15.664.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Rp.	15.664.000,-	APBD
	Rp.	15.664.000	
2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	392.547.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	Rp.	57.016.750,-	APBD

Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	57.016.750	
➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	50.812.750,-	APBD
➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	34.636.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	250.081.500,-	APBD

Kuala Pembuang,

Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang PDG, PHA dan PKA


PIRUS YUANI, S.Sos., M.A.P.
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19780611 200604 2 016
Pihak Pertama

Penyuluh Sosial Ahli Muda


SITI IFFAH, M.PD.S.I.
 Penata Muda Tingkat I (III/b)
 NIP. 1984005 200903 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PRAPTI SUDARMI,SKM,M.A.P**

Jabatan : **JFT PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ISTIYANAH, S.E., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera

ISTIYANAH, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19750327 200604 2 017

Pihak Pertama

PRAPTI SUDARMI, S.K.M., M.A.P

PENATA TK I III d

NIP.19830303 200604 2 025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	10 laporan
2.	Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	378 Orang
3.	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)	2 Laporan
4.	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	1.438.343.826	APBD
➤ Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Rp.	1.081.751.000,-	APBD

- Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita). - Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).	Rp.	831.600.000,-	
➤ Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) - Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Rp.	356.592.826	APBD
	Rp.	105.575.026,-	
	Rp.	251.017.800,-	

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera



ISTIYANA H., S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750327 200604 2 017

Pihak Pertama

JFT PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT
AHLI MUDA



PRAPTI SUDARMI, S.K.M, M.A.P
PENATA TK I IIIId
NIP.19830303 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FIRA SYAHLAWATI, S.K.M.**

Jabatan : JFT Penyuluh Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **APRIANTONI, S. Hut., M.M.**

Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua,
Kepala UPT Perlindungan Perempuan
Dan Anak

Apriantoni, S. Hut., M.M
Pembina (IV/A)
NIP. 19740402 200903 1 002

Pihak Pertama,
JFT Penyuluh Sosial Ahli Muda

Fira Syahlawati, Skm
Penata Tingkat I (III/D)
NIP. 19790404 200604 2 037

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Orang
2.	Meningkatkan Layanan Pengaduan atau penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Korban Tingkat Kabupaten/ Kota	5 Orang
3.	Meningkatkan Penguatan Meningkatkan Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) perlindungan Khusus Anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	2 Dokumen

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	30.029.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	30.029.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	30.029.000,-	
➤ PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	40.581.000,-	
➤ Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	40.581.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Rp.	40.581.000,-	

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan
Anak



APRIANTONI, S.Hut., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19750327 200604 2 017

Pihak Pertama

JFT Penyuluh Sosial Ahli Muda



FIRA SYAHLAWATI, S.K.M
PENATA TK I IId
NIP.19830303 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NURILHAMAH ,S.K.M.**

Jabatan : Pengelola Data dan Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ISTIYANAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

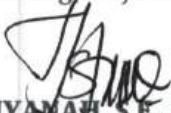
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera


ISTIYANAH, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750327 200604 2 017

Pihak Pertama
Pengelola Data dan Administrasi


NURILHAMAH, SKM
Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 19760507 200604 2 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Laporan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ➤ Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 49.003.800,0	APBD
- Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.	Rp. 49.003.800,0	

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Pertama

Pengelola Data dan Administrasi



NURILHAMAH, S.KM
Penata Muda TK.I (III/b)
NIP. 19760507 200604 2 034

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera



ISTIYANAH, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750327 200604 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KURITA, S.Sos**
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AJIANSYAH, S.Pd., MM.**
Jabatan : Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan dan
Peningkatan Kualitas Keluarga

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Pertama

Penyuluh Sosial Ahli Muda

KURITA, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19741020 200604 2 023

Pihak Kedua

Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan
dan Peningkatan Kualitas Keluarga

AJIANSYAH, S.Pd., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790808 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SERUYAN

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1.	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	30 lembaga
2.	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	4 organisasi
3.	Meningkatkan Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	50 layanan

Program /Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.		Rp.	805.917.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.	105.917.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.	105.917.000,-	APBD
➤ Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.		Rp.	700.000.000,-	APBD
- Sub Kegiatan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp.	700.000.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Rp.	44.083.000,-	APBD
➤ Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.		Rp.	44.083.000,-	APBD
- Sub Kegiatan ayanan penjangkauan keluarg dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota		Rp.	44.083.000,-	APBD

Kuala Pembuang, Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Bidang PUG, Perlindungan Perempuan
dan Peningkatan Kualitas Keluarga



AJIANSYAH, S.Pd.,MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790808 200604 1 016

Pihak Pertama

Penyuluh Sosial Ahli Muda



KURITA, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19741020 200604 2 023

BAB IV

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam penyusunan laporan Perjanjian Kinerja ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun laporan ini masih banyak kekurangan yang tentunya memerlukan evaluasi sebagai penyempurnaan dalam penulisan serta perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti peningkatan kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang **Good Governance** dan **Clean Government**.

Kepala



ARNIANSYAH, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700614 199702 1 007